

**SEGI-SEGI KEKERASAN KOTA DI SURABAYA TAHUN 1945**  
*Studi Kasus Saat Konsolidasi Kekuatan dan Pengambilalihan Kekuasaan dari Jepang Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI*

**Abstrak**

Meskipun kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan dalam kondisi “*Vacuum of Power*”, akan tetapi pihak tentara pendudukan Jepang di Surabaya tidak demikian saja menyerahkan pemerintahannya, sarana dan prasarana yang mereka duduki apalagi menyerahkan kekuasaan kepada Bangsa Indonesia. Untuk kepentingan merebut kekuasaan itu ‘Arek-arek Surabaya’ dengan gegap gempita menyelenggarakan konsolidasi kekuatan.

Konsolidasi yang terjadi di Surabaya mulai berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan gaungnya sampai di Surabaya di sekitar minggu ketiga Agustus 1945 sampai minggu kedua oktober 1945. Proses tersebut ada yang berjalan lancar, tetapi ada juga yang menimbulkan konflik bersenjata antara pihak Indonesia dan Jepang. Misalnya, pengambilalihan markas Kempetai (sekarang Tugu Pahlawan) terjadi adu kekuasaan antara pihak Jepang dan arek-arek Surabaya pada 1 hingga 2 Oktober 1945.

Nuansa kekerasan juga terjadi antara berbagai kelompok masyarakat antara pejuang dan pihak-pihak yang dianggap sebagai kolaborasi musuh, penjilat Belanda – Jepang ataupun tertuduh sebagai mata-mata penjajah. Akibatnya tidak kekuasaan juga terjadi secara horizontal antar berbagai kelompok masyarakat. Apalagi tatkala pihak Belanda berhasil memasuki Surabaya. Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah penusukan seorang wanita dengan bamboo runcing karena dituduh sebagai mata-mata. Kejadian itu berlangsung di Embong Malang pada awal Oktober 1945. Insiden bendera di Tunjungan 19 September 1945 merupakan salah satu contoh bentuk konflik antara pihak Indonesia dan Belanda. Adapun konflik antara pihak Indonesia dan Jepang terjadi pada soal perebutan gudang senjata di gedung Don Bosco, Jl. Tidar, kantor HVA di jalan Perak, gedung Luide Tioes jalan Kebonrojo, dan markas Kaigun (markas KKO) di gubeng. Konflik lebih besar terjadi antara pihak Indonesia dan Inggris dalam pertempuran 3 hari tanggal 29-31 Oktober 1945 menyebabkan tewasnya Mallaby hingga menyerah masing-masing pihak, yaitu Indonesia dan Inggris dalam kancah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

**A. Pendahuluan**

Bagi mereka yang pada dasa warsa 1950-1960-an telah menapaki usia dewasa pasti masih teringat dalam *memory* tentang ungkapan yang intinya menyatakan bahwa Indonesia adalah negeri “*tata tentrem kertarabarja gemah ripah loh jinawi, murah sandhang lan pangan*”(teratur tenteram, sejahtera dan makmur, tanahnya subur, makanan dan pakaian juga sangat murah ... “, dstnya). Ungkapan itu telah memberikan gambaran yang menina bobokkan mereka yang tidak mengamati secara cermat atau jeli perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia. Padahal berdasarkan sumber-sumber arsip atau dokumen dapat dikatakan bahwa selama akhir abad XIX dan awal abad XX di seluruh Jawa telah terjadi berbagai gerakan sosial dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, baik dalam skala besar maupun kecil.<sup>1</sup> Di sekitar Surabaya sendiri perlawanan terajdi di Gedangan, sekitar 10m km ke arah selatan, di bawah pimpinan H. Kasan Mukmin,; di

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, *Prtest movements in Rural Java , A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (Oxford University Press : Singapore, 1973).

Desa Tambakoso, dipimpin oleh Syarif Tambakoso (1904) ; Pak Sakerah (1904), di dekat Pasuruan; Dermojoyo (1907), di Bendungan, sekitar 100 km. ke arah barat.

Anehnya bersamaan dengan munculnya kelompok terpelajar sebagai pimpinan perjuangan, perlawanan tardisional di atas berhenti, dan perlawanan dilakukan melalui organisasi pergerakan nasional. Tidak lama kemudian Surabaya juga tidak ketinggalan, karena di kota ini juga berkembang organisasi pergerakan nasional. Antara lain : *Djamiat al Khair* (cabang dari Jakarta), *Al-Irsyad*, Syarekat Islam (1913), *Indonesische Studie Club* (1927, Muhammadiyah (1921), *Tasywirul Afkar*, Nahdlatul Ulama (1926), *Indonesische Studie Club* (1927), dan Parindra (gabungan dari *Indonesische Atudie Club*, Budi Utomo, dan Partai Bangsa Indonesia-PBI). Bahkan di Surabaya telah dicetuskan untuk pertama kalinya kata-kata Nasional, yang akan menjadi salah satu kata “keramat” dalam perjuangan Bangsa Indonesia, yaitu dengan diselenggarakannya “Kongres Nasional SI di Surabaya” pada tahun 1916.

Perkembangan sosial politik di atas mengiringi perkembangan Surabaya yang pada awal abad XX mengalami kemajuan sangat pesat dalam perekonomian, industri, perdagangan, pendidikan, tarnsportasi, ketenagakerjaan, perluasan kota dan juga kebudayaan. Saat itu Surabaya dalam matapelajaran Ilmu Bumi dan Sejarah disebut-sebut sebagai kota dagang dan industri terbesar di Indonesia. Memang rentangan ruang industri di Surabaya terbentang sepanjang jalan kereta api dari Wonokromo, Gubeng, Surabaya Kota, Pasar Turi dan Pelabuhan Kali Mas. Pada jalur-jalur jalan raya yang mengikuti jalur kereta api itu juga berkembang menjadi kawasan perdagangan, dengan CDB (*Central District Bisniss*-nya) di Jembatan Merah dan sekitarnya, Jl. Niaga, Jl. Kramatgantung, Jl. Gambungan, Jl. Tunjungan, Jl. Ngagel, Jl. Kaliasin, Jl. Sudirman, Jl. Kranggan, Jl. Blauran, Jl. Praban, Jl. Embong Malang, Jl. Kedungdoro, Jl. Pasar Kembang, Jl. Sawahan, Jl. Jagalan, Jl. Kembang Jepun, Jl. Mas Mansur, dan di selatan berkembang Wonokromo.

Secara demografis, penduduk Surabaya pada akhir kekuasaan Hindia Belanda berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Hampir semua etnis di Indonesia bermukim di Surabaya. Jumlah yang paling besar adalah komunitas dari etnik Jawa, Mina, Madura dan Arab. Oleh karena factor heterogenitas demografis itu Surabaya kemudian juga dikenal sebagai mininya Indonesia atau *Indonesia in small*.

Pada zaman pendudukan Jepang, Surabaya juga menjadi pusat kekuatan bersenjata Jepang, khususnya kekuatan Angkatan laut atau *Kaigun*. Selain itu di Surabaya juga terdapat Brigade Polisi Istimewa (*Tokubetsu Kaitsutai*) baik untuk tingkat daerah-daerah kabupaten di Karesidenan Surabaya (*Keistsu Syo*) maupun untuk Karesidenan Surabaya (*Surabaya Syu*). Yang menarik perhatian, setelah informasi Proklamasi Kemerdekaan RI sampai di Surabaya, *Arek-arek* Surabaya menanggapi dengan cepat dan sangat antusias. Momentum tersebut kemudian dalam tempo singkat dan cepat digunakan melakukan konsolidasi kekuatan, pengambilan alihan kekuasaan dari tangan Jepang, dan menghadapi pasukan Inggris sebagai bagian dari SEAC (*Southeast Asia Command*). Pasukan ini ternyata juga diboncengi kekuatan Belanda. Surabaya yang suasananya telah memanas kemudian menyulut konflik tatkala pihak Belanda dengan provokatif mengibarkan bendera Tri Warna di *Yamato Hotel* (Hotel Tunjungan). Konflik bendera tersebut menandai berbagai kekerasan di Surabaya, yang terus berlangsung sampai akhir Oktober dan awal Nopember, menjelang peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Salah satu puncak kekerasan itu adalah peristiwa terbunuhnya Brigadir Mallaby dan Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya.

## **B. Tujuan Kajian**

Kajian ini bertujuan mengungkap permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Proses-proses konsolidasi kekuatan pasca Proklamasi di Surabaya sehingga mampu memfokuskan kekuatan *Arek-arek* Surabaya untuk melancarkan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang sehingga mampu memperkecil konflik-konflik sosial secara horizontal? Padahal sehubungan dengan posisi *statusquo* pihak Jepang, peluang untuk meletupnya *social mob* sangat besar.
2. Kekerasan-kekerasan sosial yang terjadi di Surabaya dan motif-motifnya, padahal penggalan massa pasca proklamasi untuk kepentingan perjuangan telah diusahakan secara intensif dan optimal.

## **C. Pembahasan**

### **C.1. Berita Proklamasi Kemerdekaan di Surabaya.**

Sebenarnya berita proklamasi Kemerdekaan RI yang dipancarkan dengan *morse cast* dari pemancar radio Domei Jakarta, ditangkap oleh Yacob, petugas pemancar radio Domei Surabaya dalam bentuk morse dan langsung diterima dengan mesin tulis (ketik?) ditangkap satu. Adapun di Kantor Berita Domei Surabaya menerima berita Proklamasi sekitar pukul 11.15 tanggal 17 Agustus 1945.

Untuk mendapatkan kebenaran berita pada hari itu juga tidak sedikit orang-orang yang mendatangi Stasiun Semut (Surabaya Kota) dan Stasiun Gubeng untuk mendapatkan berita dari mereka yang datang dari Jakarta. Oleh wartawan Domei naskah Proklamasi yang telah diketik kembali selanjutnya ditempel di pintu depan kantor berita itu. Namun tempelan teks proklamasi tersebut kemudian dirobek oleh *Kenpeitai* yang mendatangi kantor Berita Domei karena banyak mendapatkan perhatian rakyat dan pemuda yang menggerombol di depannya. Lokasi gedung Kantor Berita Domei berseberangan jalan dengan Kantor *Kenpeitai* yang berada di barat jalan, sekarang menjadi Monumen Tugu Pahlawan. Akibatnya terjadilah ketegangan.

Berita proklamasi yang telah diterima oleh Kantor Berita Domei pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pula segera disampaikan kepada Mohammad Ali, redaksi harian "*Soeara Asia*", yang berkantor di sebelahnya, yaitu Jl. Alun-alun 30 (sekarang Jl. Pahlawan). *Soeara Asia* adalah koran satu-satunya di Jawa Timur yang penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Indonesia bagian Timur. Mohammad Ali sebenarnya pada hari itu juga (untuk terbitan 18 Agustus 1945), akan segeranya secara lengkap pada halaman pertama, akan tetapi tiba-tiba ada berita bantahan dari Jakarta, hingga orang-orang di *Soeara Asia* menjadi ragu. Setelah mendapatkan penegasan dari Ahmad, Redaktur Kawat Kantor Berita Domei Jakarta, bahwa proklamasi itu benar, selanjutnya orang-orang *Soeara Asia* memuatnya dengan judul merah pada terbitan sore. Selain itu juga direlis berita proklamasi. Di depan kantor *Soeara Asia* ditempel pula selebaran proklamasi dengan huruf-huruf besar, sehingga orang-orang yang lewat dengan gampang membacanya.

Baru pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945 harian *Soeara Asia* memuat Teks Proklamasi, keputusan PPKI tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Pembukaan UUD 1945, pembagian wilayah RI dalam propinsi-propinsi sebagai berita secara lengkap.

## **C.2. Konsolidasi kekuatan di Surabaya Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI**

Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan, akan tetapi pemindahan kekuasaan sebagaimana disebutkan dalam teksnya, yakni “ **diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh sesingkat-singkatnya**” belum dapat dilaksanakan saat itu juga dari tangan Jepang, yang oleh Sekutu telah ditetapkan sebagai *status quo*, sampai pihak Sekutu tiba untuk mengembalikannya. Bagi Indonesia, kekuasaan itu sangat diperlukan bagi kelangsungan hidupnya dan Negara yang baru akan dilahirkan, namun untuk mengoper kekuasaan itu dari tangan Jepang, juga bukan sesuatu yang mudah. Di pihak Jepang sendiri setelah 14 Agustus 1945 menjadi taklukan Sekutu, sehingga Jepang telah tidak memiliki wewenang mengalihkan kekuasaannya kepada pihak Indonesia. Untuk melaksanakan pengembalian kekuasaan Jepang, *Arek-arek* Surabaya memerlukan suatu kekuatan yang mampu menghadapi dan melucuti kekuatan senjata Jepang, tulang punggung kekuasaan Jepang di Surabaya. Dengan demikian setelah proklamasi tersebar luas, dihayati dan difahami maknanya bagi kehidupan suatu bangsa, langkah berikutnya ialah mempersatukan seluruh kekuatan rakyat yang bertebaran dan belum sepenuhnya terhimpun dalam wadah yang memungkinkan melaksanakan tugas-tugas pengembalian kekuasaan Jepang yang sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya. Dengan demikian sebelum pengambil alihan kekuasaan dilaksanakan terlebih dahulu diselenggarakan konsolidasi, yaitu langkah meyatukan tindakan atau aksi, untuk memperteguh dan memperkokoh perlawanan agar tercapai kemenangan. Sebab bila tidak ada konsolidasi, tidak mustahil akan berkecamuk anarki. Konsolidasi yang dilakukan *Arek-arek* Surabaya diantaranya adalah pembentukan badan-badan pemerintahan sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat, atau pun pembentukan badan-badan perjuangan seperti BKR, Pemuda Republik Indonesia (PRI), Badan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), dan organisasi-organisasi lainnya.

Di dada putra-putri Indonesia yang telah lama memendam nyala api perjuangan, setelah mendengar bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar telah diproklamkan, kemudian meledak menjadi tindakan nyata untuk menyongsong dan membentengi, menjadi banteng bagi kemerdekaan yang telah lama diidamkan. Bila di Jakarta dari 18-22 Agustus 1945 secara marathon tokoh-tokoh di tingkat nasional sibuk menyelenggarakan sidang-sidang PPKI, maka di Surabaya yang *Arek-arek*-nya telah bangun dengan spontan dan tanpa banyak pertimbangan segera menerbitkan Teks Proklamasi secara lengkap di *Soeara Asia* secara lengkap pada edisi 20 Agustus 1945. Kesibukan terjadi di seluruh penjuru kota, sebagai wujud konsolidasi *Arek-arek* Surabaya guna menyongsong berbagai kemungkinan yang akan dihadapi Negara republik Indonesia yang baru diproklamkan.

### **C.2. 1. Di lingkungan Pemerintahan**

Pada masa pendudukan Jepang tidak sedikit pemimpin Indonesia yang berperan dalam birokrasi dan pemerintahan. Antara lain KRT Suryo menjabat Residen Bojanegara dan R. Sudirman sebagai wakil Residen Surabaya. Dengan demikian tokoh-tokoh ini selain memiliki jalur vertikal, juga membina lingkungan korponya agar tetap memperjuangkan nasib rakyat dan bangsanya. Mengetahui adanya proklamasi kemerdekaan dan

perkembangan politik di tingkat pusat demikian pesaatnya, R. Sudirman, sebagai salah seorang pimpinan Pemerintahan Kota (*Fuku Syucokan*) Surabaya tidak mau ketinggalan. Pada hari Senin, 20 Agustus 1945 di Kantor *Fuku Syucokan* atas prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri R. Sudirman mengadakan upacara menyambut Indonesia merdeka. Dalam upacara itu ia antara lain menyatakan sebagai berikut.

“Saudara Sukarno Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini marilah kita renungkan sebentar, bahwa kemerdekaan ini datangnya di saat yang genting. Maka saya harap segenap kawan-kawan dari segala tingkatan dan golongan meneruskan kewajiban masing-masing dengan seksama, agar cepat mencapai kemerdekaan yang sempurna.”<sup>2</sup>

Permintaan Sudirman ternyata mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Ruslan Wongsokusumo, Ketua Barisan Pelopor Surabaya menjawab ajakan Wakil Residen itu menyatakan bahwa Barisan Pelopor wajib menjalankan perintah itu, dan akan bertugas menjaga ketenteraman umum dan bekerjasama dengan badan-badan, jawatan serta golongan lain.

Selanjutnya para pemuda dalam Panitia Angkatan Muda Indonesia di bawah pimpinan *Cak Dul* Arnowo bergerak menyalin teks-teks proklamasi pada kertas-kertas kemudian ditempelkan di tempat-tempat strategis. Dengan demikian berita proklamasi tersebar luas di seluruh pelosok kota Surabaya.

## **C.2. 2. Polisi Istimewa**

Dinamika *Arek-arek* Surabaya dalam mendukung proklamasi tidak hanya terbatas pada kelompok sipil, tetapi juga meluas pada kekuatan bersenjata, yaitu *Tokubetsu Keisatsutai* atau Polisi Istimewa (PI). Komandananya, Inspektur Polisi Tingkat I Mohammad Jasin beserta anak buahnya pada 21 Agustus 1945 memproklamasikan bahwa Polisi Istimewa (Surabaya) sebagai Polisi Republik Indonesia, mengambil tindakan sebagai berikut.

1. Tanggal 19 Agustus 1945 di markas PI terjadi insiden bendera. Bendera Jepang diturunkan dan bendera Merah Putih dikibarkan.
2. Pada 20 Agustus 1945 anggota PI dari bangsa Indonesia memutuskan :
  - a. Menahan pimpinan PI bangsa Jepang dan menggantinya dengan M. Jasin.
  - b. Hubungan telepon diputus.
  - c. Membongkar gudang senjata untuk menmabh senjata pasukan dengan senjata-senjata berat.
  - d. Memproklamasikan PI sebagai Polisi RI pada 21 Agustus 1945.
  - e. Mengadakan apel pagi pada 21 Agustus 1945, KOMandan PI membaca teks proklamasi di hadapan pasukan.
  - f. Mulai pukul 08.00 tanggal 21 Agustus 1945 poster-poster proklamasi ditempel pada tembok di sepanjang Jl. Tunjungan.
  - g. Pada 21 Agustus 1945 PI turun ke jalan melakukan defile sebagai pamer kekuatan.

Adapun teks proklamasi PI sebagai Polisi RI sebagai berikut.

### **Proklamasi**

Oentoe bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia.

Surabaja, 21 Agoestoes 1945

Mohammad Jasin  
Inspektur Polisi Tk. I

Passukan PI adalah satu-satunya pasukan terlatih yang dipersenjatai sehingga berbobot tempur yang utuh (*combatant*), dan belum diluucuti Jepang.

Pernyataan PI itu diketik kemudian disebar luaskan, ditempel di tepi jalan besar. Pada hari itu juga PI di markasnya menurunkan bendera Jepang (*Hinomori*) diganti dengan mengibarkan bendera Merah Putih di *Coen Boulevard* (Jl. Dr. Sutomo 7-sekarang Kompleks Sekolah St. Louis). Semua anggota PI diperintahkan tidak menyerahkan senjata kepada siapapun. Pimpinan PI *Sidokan Takata* dan *Fuku Sidokan Nishimiro* dikucilkan.

Pernyataan PI telah mendorong keberanian bekas pasukan bersenjata *Heiho* dan Peta yang telah dibubarkan untuk mengambil alih atau melucuti senjata Jepang.

### **C.2. 3. Pembentukan KNI Daerah Karesidenan dan Kota Surabaya**

Menindak lanjuti Maklumat Presiden yang menyatakan bahwa pembangunan Negara Indonesia yang diinginkan oleh rakyat sedang dilaksanakan dan akan selesai dalam waktu yang pendek, untuk itu tenaga-tenaga yang bertanggung jawab agar ikut serta dalam pembangunan ini. Diharapkan semua lapisan rakyat Indonesia tenang, tenteram, serta siap sedia memegang teguh disiplin.<sup>3</sup> Dalam siang tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan tentang pembentukan PPKI, baik di tingkat pusat (KNIP) maupun di tingkat daerah (KNID).

Menindak lanjuti keputusan PPKI di atas, Presiden mengeluarkan instruksi tentang pembentukan KNI di daerah (KNID), yang telah sampai di Surabaya pada 23 Agustus 1945. KNID Surabaya terbentuk di bawah pimpinan Dul Arnowo, berkat kecekatan *Arek-arek* Surabaya yang tergabung dalam Angkatan Muda dalam rapat selama 3 hari terus-menerus untuk membentuk KNID Surabaya di Gedung Nasional Indonesia (GNI), dari 25 sampai 27 Agustus 1945. Tidak lama sesudah itu juga terbentuk KNI Kota Surabaya di bawah pimpinan Sumantri, dengan anggota-anggotanya antara lain : Ruslan Wongsokusumo, Dr. Sugiri, dll.

Selanjutnya KNID Surabaya dalam menyambut sidang pertama KNIP di Jakarta pada 29-31 Agustus 1945, mengumumkan kepada rakyat agar mengibarkan bendera Merah Putih. Pengumuman tersebut disambut dengan serentak di Surabaya, hingga sang Merah Putih telah berkibar di sana-sini dengan perkasa dan megahnya memenuhi angkasa

---

<sup>3</sup> Barlan Setiadidjaja, *Merdeka atau Mati di Surabaya Tahun 1945* (Naskah Sementara : Jakarta, 1984), halaman 23-24.

Surabaya, mendahului Maklumat Pemerintah tentang pengibaran bendera nasional mulai 1 september 1945.

Gelora *Arek-arek* Surabaya meluas dan mereka kemudian melakukan aksi-aksi menyobek pengumuman Jepang larangan *Kenpeitai* tentang hal-hal yang mengganggu keamanan, penyebaran berita bohong, dan larangan bertindak bohong serta menghina.

#### **C. 2. 4. Badan Keamanan Rakyat (BKR)**

Karena berbagai kesibukan seperti : Sidang KNI Pusat, *flaggen actie*, pembentukan KNI Karesidenan dan Kota Surabaya pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) baru dapat dilakukan tanggal 2 September 1945. Dalam kesempatan itu juga dibentuk BPKP (Badan Penolong Korban Perang) bertempat di Jl. Kaliassi (Jl. Basuki raahmat 121), Surabaya. Rapat dihadiri hampir semua bekas pimpinan Peta, *Heiho*, dan kaum pergerakan, antara lain : RM Suryo, Sutopo, H>r> Muhammad, Katamhadi, Ronokusumo, Kunkiyat, Sungkono, Kholil Tohir, Yonosewoyo, Abdul Wahab, Usman Aji, drg. Mustopo. Dalam rapat itu berhasil dibentuk susunan pengurus BPKP dengan Dul Arnoowo sebagai ketua, dibantu HR. Muhammad (Wakil Ketua), Sutopo (bekas *daidanco*), dan Bagian keuangan : Notohamiprojo dan Abdul Syukur.

Adapun susunan Pengurus BKR terbentuk dengan Drg. Mustopo (Ketua), Sunarso (Bagian), Katamhadi (bekas *Daidanco*), Abdul Wahab (*Cudancco*), Sutomo/Bung Tom,o (wartawan Antara), Sutopo dan Alamsyah. Akan tetapi situasi berkembang dengan cepat, hingga diperlukan institusi yang mampu mewakili kepentingan pemerintah pada tingkat propinsi. Padahal level pemerintahan tersebut belum terbentuk. Untuk itu kemudian pada 4 September 1945 dalam rapat digedung HBS (SMA Kompleks Wijayakusuma), diputuskan untuk membentuk 3 eselon BKR, yaitu : BKR Jawa Timur, BKR Karesidenan Surabaya dan BKR Kota Surabaya, dengan personalia sebagai berikut.

**4.1. Pimpinan BKR Jawa Timur, terdiri dari ::** Drg. Mustopo (bekas *Daidanco*-panglima), Suyatmo (KAS Umum), HR. Muhammad Mangundiprojo (Urusan Darat), Atmadji (Urusan Laut), Rustam Zein (Intelijen), Suyono Prawirobismo (Pemberitaan), Suryo (Keuangan), Dr. Sutoyo (CBZ Simpang), Katamhadi (Siasat), Prabowo (Persenjataan), Kresno & Yeti Zein (Sekretariat-Mhs. Kedokteran Giigi).

**4.2. Pimpinan BKR Karesidenan Surabaya :** Abdul Wahab (bekas *Cudancco*-Ketua), Yonosewoyo (bekas *Cudancco*-Wakil), Susilo (bekas *Cudancco*-Penulis). BKR Karesidenan Surabaya semula bermarkas di pavilion GNI, kemudian pindah ke gedung *Kenpeitai* (Raad van Justitie-sekarang Tugu Pahlawan). BKR karesidenan berkekuatan inti dipimpin oleh Suharyo, terdiri dari 8 barisan/kompi, dengan anggota sekitar 250 orang. Masing-masing Barisan BKR dipimpin oleh Suyoto (Br.I), Basuki (II), Subiyanto (III), Kartono (IV), Tajudin Lubis (V), Mohammad Umar (VI), Suwanto (VII), dan Bambang Yuwono (VIII).

Selanjutnya juga terbentuk beberapa kesatuan BKR, seperti BKR Genie di Don Bosco dipimpin oleh Hasanuddin Sidik, BKR BPM dipimpin Isa Idries, dan BKR kelompok Usman Aji. Juga berhasil dibentuk Resimen Gaja Mada dipimpin Suharjo (Kecik).

BKR Karesidenan Surabaya selain mendapat tambahan pasukan *Heiho* dari Doping, Sikang yang akan pulang ke kampungnya berjumlah sekitar 250 orang dipimpin oleh Abel Pasaribu dan Anwar Batubara, juga diperkuat oleh BKR-BKR di kabupaten

Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Gresik di bawah kordinansi BKR karesidenan Surabaya.

Kejadian sejarah yang mengesankan antara lain dalam proses pengambil alihan kekuatan didahului perundingan-perundingan dengan Jepang dan Sekutu. Mereka senantiasa menghendaki hadirnya Wakil yang mendapat wewenang dari Pemerintah RI sebagai persyaratan berunding. Untuk mengatasi kesulitan itu, Drg. Mustopo sebagai Ketua BKR Jawa Timur menggunakan kedudukannya sebagai “Menteri Pertahanan *ad interim*”. Tindakan itu ternyata dapat diterima oleh pihak Jepang, dan sering menunjukkan hasil gemilang serta sangat menguntungkan untuk menegakkan kedaulatan RI. Dalam posisi sebagai Menteri pertahanan itu Grg. Mustopo telah menerima penyerahan kekuasaan, senjata, dan jumlah uang yang cukup banyak untuk biaya revolusi.

Keberanian Drg. Mustopo direspon positif oleh Pemerintah Pusat, dalam dal ini lewat Jaksa Agung Mr. Gatot, mengeluarkan pernyataan dan pengakuan agar ia terus menjabat pekerjaan Menteri Pertahanan dan kepadanya diberi kuasa penuh menyelenggarakan pertahanan negara. Lebih dari itu Jaksa Agung juga menyerukan kepada seluruh rakyat dan badan-badan pemerintahan agar terus membantu langkah-langkah Drg. Mustopo dalam tugasnya. Sebagai landasan hukum, ddikeluarkanlah surat keterangan untuk Drg. Mustopo agar dapat bertindak “secara Menteri Pertahanan” dan melaksanakan tugas-tugas Menteri Pertahanan.<sup>4</sup> Dalam posisi tersebut Drg. Mustopo menyusun stafnya seperti diatas.

Sebagai Menteri Pertahanan merangkap Ketua BKR Jawa Timur, Mustopo berhasil mengkordinasikan kelompok-kelompok antara lain : Mahasiswa *Shika Daigagku* (Kedokteran Gigi) ; Pemuda Republik Indonesia (PRI), Kelompok Ngampel (Keturunan Arab), Barisan Bawah Tanah (terdiri dari bekas copet, pencuri, bajingan, pelacur, *bromocorah*, kere), Pemuda Angkatan Laut, Barisan Pemberontak RI (tukang becak, *gembel*, Pasukan dan Badan Perjuangan pimpinan Ramli dan TRI pimpinan Yonosewoyo.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya ternyata juga tidak mudah mempersatukan persepsi, langkah, dan fokus perjuangan dalam situasi dan kondisi yang sangat cepat berubah dan tidak menentu, dan timbullah hal-hal yang rumit yang sangat membebani Drg. Mustopo menjadi sangat berat. Akhirnya ia menjadi stress. Dalam kondisi demikian ia sering meracau (Jawa : *groyok*) dan mengusulkan dilaksanakannya konsep operasi yang disebutnya sebagai *himitsu senso sen*, artinya : perang kota. Untuk kepentingan ini Mustopo telah membentuk pasukan di bawah tanah, terdiri dari teman-temannya bekas Peta, yang diberinya nama *Semen Jo궑o*. Dalam koniidisi jiwaanya yang labil di tengah-tengah kesibukan *Arek-arek* Surabaya yang luar biasa pada akhir Oktober 1945, Mustopo bersama-sama teman-temannya untuk menerapkan *himitsu senso sen* meninggalkan Surabaya pergi ke arah Mojokerto. Sementara itu di Surabaya pecah pertempuran seru melawan tentara Inggris (Sekutu) hingga menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby. Pada saat Bung Karno ke Surabaya untuk meleraikan persengketaan antara *Arek-arek* Surabaya-pasukan Inggris, setelah mendapatkan laporan tentang kondisi Drg. Mustopo kemudian memberhentikannya dari jabatan Menteri Pertahanan. Dalam pemilihan yang diselenggarakan di gedung HVA (sekarang PNP XXII-Gula), terpilih Yonosewoyo menggantikan Drg. Mustopo sebagai Ketua BKR Jawa Timur.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mustopo, Prof. Dr., *Latar Belakang Perjuangan 10 Nopember 1945 di Surabaya* (Jakarta, 1983), halaman 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>6</sup> Nugroho Notosusanto, *Pertempuran Surabaya* (Mutiara Sumber Widya : Jakarta, 19820), halaman 95.

Dengan adanya Dekrit 5 Oktober 1945, kesatuan-kesatuan BKR di Surabaya berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawa Timur, markasnya di gedung *Hoogere Burgere School* (HBS), dengan kekuatan 10 kompi yang terdiri dari 2.000 anggota. Adapun TKR Karesidenan Surabaya di bawah Yonosewoyo bermarkas di Embong Sawo No. 5 membawahi di antaranya Resimen Gajah Mada dan 5 Batalyon dan kompi-kompi pimpinan Abel Pasaribu, Suyono Ongko (Perhubungan), Sampurno (Unit Bantuan senjata). Masing-masing batalyon dipimpin oleh Masduki Abu (TKR Tembaan), Samekto Adi, Bambang Yuwono, Isa Edris (TKR BPM), Hasanuddin Sidik (TKR Genie).

Pembentukan BKR juga melingkupi unsure-unsur kekuatan laut, yaitu basis Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*) yang disebut *SE 21/24 Butai* diubah menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL) dengan kekuatannya sekitar 3.000 anggota Badan Kebaktian (*Hokodan*) diubah menjadi Serikat Buruh Indonesia (SBI PAL) dan Barisan Sukarela (*Daidan*) menjadi Angkatan Muda Penataran Angkatan Laut (AMPAL). Dari kedua organisasi ini pada 22 September 1945 direkrut menjadi Tentara Angkatan Laut (TAL) yang markasnya berpusat di *Modderlust* dan Hotel Ngemplak. Dalam perkembangannya TAL diubah menjadi BKR Laut. Kapal-kapal yang berhasil dikuasai seperti *beatric*, *Irene* dan *Prins Bernhard* dicat dengan tulisan BKRL. BKRL dipimpin oleh Atmaji, bekas Pejabat AL Belanda (Ketua) dan dibantu antara lain oleh : Affandi, Munaji, Gunadi (Perwira AL Belanda). Untuk mengembangkan BKRL Atmaji disumbang dana oleh Dr. Samsi sebanyak Rp. 5.000.000,-<sup>7</sup> Atas usul Gunandi BKRL kemudian diubah menjadi Marine Keamanan Laut (MKL), dan Atmaji diberi pangkat Laksamana MKR.

Pada 2 Oktober 1945 *SE 21/24 Butai* atau PAL dinyatakan sebagai milik RI, dipimpin oleh Mohamad Affandi sebagai Ketua, dan Munaji menjadi Wakil Ketua dengan Drg. Mustopo (menteri Pertahanan) dan Katamhadi sebagai penasihat militernya.

### **C. 2. 5. Pemuda Republik Indonesia (PRI)**

*Arek-arek* Surabaya dari kalangan muda di Surabaya sejak diterimanya berita proklamasi secara meykinkan pada 20 Agustus 1945 keluar masuk kampung-kampung membangkitkan dan menggerakkan semangat rakyat untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Segala sesuatu yang penting-penting oleh para pemuda dilakukan tanpa ragu-ragu.<sup>8</sup>

Sementara organisasi buatan Jepang *Keibodan* dibubarkan, dan pada 24 Agustus 1945 Jepang menyatakan bahwa Perang Asia Timur Raya berakhir, dan Tenno Heika telah tunduk kepada Sekutu, *Arek-arek* Surabaya mulai memperdebatkan pengambilalihan dan perlucutan senjata Jepang. Bertempat di rumah seorang pembesar Jepang yang telah diambil alih di *Princesslaan 1* (Jl. Widodaren) pada 20 September 1945 membentuk Pemuda Republik Indonesia (PRI) sebagai satu-satunya wadah perjuangan bagi pemuda di Surabaya, dengan Sumarsono (Ketua), Krissubanu (Wakil I), Kusnadi (Wakil II), B. Kaslan, Ruslan Effendi Penulis I dan II dan Nn. Supiyah (Bendahara).<sup>9</sup>

Organisasi kepemudaan seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) yang telah ada sebelumnya, pimpinannya Ruslan Abdulgani menyerahkan pimpinan AMI kepada

---

<sup>7</sup> Kelompok Kerja Sejarah 10 Nopember 1945 di Jakarta, *sekitar 10 November 1945, Badan-badan Perjuangan Perjuangan yang terlibat dalam Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya* (Naskah kepada panitia pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan 10 Nopember 1945 di Surabaya, 1985), halaman 5.

<sup>8</sup> Usman Raliby, *Sedjarah Hari Pahlawan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1952), halaman 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 107.

Sumarsono. Rumah di *Princesslaan 1* dijadikan sebagai Markas Besar PRI atau Markas Komando Revolusi Surabaya. Atas inisiatif Sumarsono dan Ruslan Wijayasastra disepakati PRI akan memelopori pengambil alihan kekuasaan dan persenjataan Jepang. Untuk mematangkan hal tersebut direncanakan menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Tambaksari, pada September 1945. Karena aktivitas PRI demikian gencarnya kemudian MB PRI dipindahkan ke *Simpang Societet* (sekarang Balai Pemuda). Selanjutnya oleh PRI membentuk cabang-cabangnya di seluruh wilayah kota Surabaya, yaitu : PRI Wilayah Utara, PRI Wilayah Tengah, PRI Wilayah Selatan, dengan cabang-cabang PRI di : *Kampemen*, Sidodadi, Ketabang, Bubutan, Kalisain, dan Darmo.<sup>10</sup>

Pembentukan PRI dengan pimpinannya juga dilakukan oleh pemuda-pemuda Ambon -PRI Ambon (M. Supiya), PRI Maluku (Rambe), PRI Sulawesi-PRISAI (Yan Tampi dan J.H. Tamboto), PRAI Wanita (Ny. EB Bachdin Kaunang), PRI Kalimantan (Abdul Murad).

Khusus untuk menampung para pemuda yang juga tidak mau ketinggalan berjuang kemudian dibentuk Pemuda Putri Indonesia (PPRI) melingkupi Pemuda Putri pelajar-mahasiswa, Pemuda Putri kantor/pekerja, dan Pemuda Putri di kampung-kampung. Pimpinan PPRI antara lain : Luikitaningsih-KB Indonesia (Ketua), Mursiah-Pelajar SMT (Wakil), Maasye siwi-Kantor Kotapraja (Penulis), Yetty Zein - Mahasiswa (Bendahara).

Salah satu tugas PPRI untuk membantu perjuangan *Arek-arek* Surabaya mendirikan Pos-pos panag Merah dan dapur umum antara lain di : *Kampemen*, *Palmpitan*, Kantor Asuransi BP 1912, *Kedungsari*, *Embongsawo*, dan *Prgolan* sebagai dapur umum induk. Tugas lain yang dilaksanakan PPRI menolong para pengungsi, membantu perawatan di *CBZ Simpang*, dll.

### **C. 2. 6. Kantor Berita Antara.**

Dua minggu setelah Proklamasi, yaitu pada 2 September 1945 para wartawan nasionalis revolusioner mendirikan Kantor Berita Indonesia (KBI) dan menamakannya dengan KBI Antara. Kantornya di Jl. Tunjungan 100 (sudut Embong Malang-Tunjungan). Mulai 3 September 1945 KBI Antara Surabaya mulai bekerja dengan menyiarkan "Proklamasi" Resdien Sudirman yang menyatakan bahwa Daerah Karesidenan Surabaya sebagai bagian dari Wilayah RI. Para pejuang *Arek-arek* Surabaya dengan dipelopori oleh Sutomo (Bung Tomo), Wiwiek Hidayat mengambil alih KB Domei dan mengintegrasikannya ke dalam KBI Antara. Susunan pimpinan KBI Antara Surabaya di antaranya : RM Bintarti, Aminuddin Lubis, Syamsul Arif (Pemimpin Usaha), Sutomo, Wiwiek Hidayat, suami W. (Pak Petruk) (Redaksi).<sup>11</sup>

### **C. 2. 7. Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR)**

Pasca perebutan gedung *Kenpeitai* dan dibentuknya TKR diperlukan pengawasan terhadap disiplin para anggotanya. Untuk kepentingan tersebut Hasanuddin Pasopati dan N. Suharyo dengan persetujuan pimpinan BKR Jawa Timur membentuk Polisi Militer, yang selanjutnya dinamakan PTKR. Hasanuddin Pasopati, pemuda keturunan Madura

---

<sup>10</sup> Kelompok Kerja 10 Nopember 1945, *op. cit.*, halaman 2.

<sup>11</sup> Wiwiek Hidayat, *Sejarah dibentuknya Antara di Jawa Timur* (Surabaya, stensilan, 1982), halaman 5.

diserah pimpinan PTKR dengan paangkat Letnan Jenderal, kemudian setelah ada reorganisasi dalam tubuh TKR menjadi Letnan Kolonel.

### **C.2. 8. Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya**

Dalam gempita konsolidasi kekuatan di Surabaya radio sebagai alat penyampaian informasi yang saat itu sangat vital tidak luput dari perhatian *Arek-arek* Surabaya. Radio Jepang (*Surabaya Hosokyoiku*), yang pada zaman Belanda (sampai 1942) bernama *Nedlandsch Indische Radio Omroep* (NIROM), pada 19 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk mengumumkan berita Proklamasi oleh RP Jakfar Brotoatmodjo dengan bahasa Madura. Pada 22 Agustus 1945 secara *de facto* Radio Surabaya diresmikan sebagai RRI Surabaya. Untuk keperluan mobilisasi umum kemudian tempat-tempat strategis radio umum yang telah ada sejak zaman Jepang diperbanyak. RRI Surabaya juga berperan besar dalam mensukseskan rapat raksasa di Pasar Turi dan Tambaksari hingga massa rakyat berbondong-bondong membanjirinya. Dalam konsolidasi dan mobilisasi kekuatan *Arek-arek* Surabaya RRI itu menjadi penggerak utama serta penyampai perkembangan perjuangan sehingga berbagai eksklaha paham dapat diatasi.

### **C. 2. 9. Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI)**

Situasi kondisi Surabaya pada September-November 1945 diliputi gegap gempita perjuangan, yang tidak jarang juga penuh ketegangan. Oleh karena itu ghuana meliputi berita panas dalam masa pergolakan tersebut diperlukan keberanian dan kelincihan. Modal itu ternyata dimiliki oleh wartawan muda Sutomo (Bung Tomo). Dalam berbagai pengambil alihan kekuatan Jepang Bung Tomo menjadi aktor handal. Misalnya pengambil alihan Don Bosco, KB Domei, Kantor Gula *Ensuiko Seito Kaisha*. Bung Tomo juga berkesempatan ke Jakarta dan melihat dengan mata kepala sendiri bahkan berhubungan dengan para tokoh tingkat nasional. Di Jakarta Sutomo selain memberikan petunjuk cara-cara pengambil alihan kekuasaan dan persenjataan Jepang seperti dilakukan *Arek-arek* Surabaya juga menemui Bung Karno dan Amir Syarifuddin. Kepada kedua tokoh itu Bung Tomo yang menyaksikan sendiri kekejaman NICA dan kaki tangannya di Jakarta, mengusulkan untuk mengobarkan semangat rakyat melawan NICA lewat pemancar radio.<sup>12</sup> Usul itu disetujui, namun Amir Syarifuddin menyatakan tidak boleh menggunakan RRI.<sup>13</sup>

Untuk mengobarkan semangat melawan Sekutu dan NICA, serta memperkokoh semangat rakyat yang saat itu telah bersifat *extremistis*, pada 12 Oktober 1945 bersama-sama pemimpin rakyat jelata, seperti: sopir, tukang becak, kusir, penjual makanan, pemuda kampung yang berani mati, orang-orang tua berilmu gaib, dan lain-lain membentuk Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Adapun anggota pimpinannya antara lain: Bung Tomo, Sumarno (bekas pejabat Perkebunan), Asamnu (bekas Gerindo), ikut memngkomando penyobek bendera di Tunjungan, Abdullah (pemberontak kapal *Zeven Provincien*), Atmadji, Sudjarwo (bekas Gerindo), dan suluh Hangsono (mahasiswa Kedokteran Gigi).

---

<sup>12</sup> Sebelum ke Jakarta Bung Tomo dan Wiwiek Hidayat telah diberitahu bahwa PJG Huijer, perwira AL Belanda telah berada di Surabaya menyamar sebagai *officer* (perwira) Sekutu.

<sup>13</sup> Bung Tomo, *Dari 10 Nopember 1945 ke Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 1982), halaman 37-38.

BPRI berusaha menimbulkan pemberontakan di kalangan rakyat jelata kepada kekuatan kolonial dengan mengalirkan darah, bila kedaulatan RI diinjak, atau bila keselamatan pemimpin yang tengah berdiplomasi terancam. Kegiatan lainnya, BPRI juga petugas ke berbagai karesidenan di Jawa timur serta membnetuk persiapan pimpinan pemberontakan rakyat di daerah yang dikunjungi. BPRI mempunyai stasiun radio sendiri sebagai *Revolutie Zender*, Radio Pemberontakan yang mengudara mulai pukul 19.30 dengan gelombang yang tidank tentu.

### **C. 2.10. Pasukan Hizbullah**

Sebagai kelanjutan dari aktivitas MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia), sebagai wadah dari unsure-unsur Partai Syarikat islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, KH Tohir Bakri dan Anwar Zein, Ketua dan Sekretaris MIAI Surabaya mengirim 10 pemuda dari Karesidenan Surabaya dalam latihan kader *Hizbullah* di Cibarusa Bogor. Latihan kader itu diselenggarakan dari Februari-Mei 1945. Setelah selesai masing-masing utusan menjadi instruktur dan membentuk *Hizbullah*. Latihan-latihan di laksanakan di daerahnya masing-masing, sedang untuk Surabaya dilaksanakan di Kawatan dan Kemayoran.

Pada bulan September 1945 terbentuk Hizbullah Surabaya dipimpin oleh H. Abdannafik (Ketua, Tohir bakri (Wakil), dan Anwar Zein (Sekretaris). Pada awal Oktober 1945, setelah jatuhnya markas *Kenpeitai* (1-2 Oktober 1945) di Subaya dibentuk cabang-cabang *Hizbullah* dengan pimpinannya, meliputi : Surabaya Utara (KH Abdannafik), Surabaya Tengah (Khuzainy Tiway), Surabaya Barat Ikhsan (Damiri), dan Surabaya Timur (Abdul Manan, eks *sodanco* Peta). Persenjataan *Hizbullah* diperoleh lewat jalur BKR-PTKR dan PRI. Pada saat terjadi pertempuran 3 hari (28-31 Oktober 1945) *Hizbullah* bersama-sama dengan barisan pejuang lainnya bertempur melawan Sekutu. Barisan Hizbullah dari luar Surabaya dengan angkutan kereta api juga turut serta dalam pertempuran melawan Sekutu, baik dalam pertempuran akhir Oktober maupun pertempuran 10 Nopember 1945.<sup>14</sup>

### **C. 2. 11. Pembentukan Kelompok-kelompok Pejuang lain.**

Sebagai kota dagang dan industri terbesar sebelum Perang Dunia II, secara demografis Surabaya memiliki heterogenitas baik etnis, stratigrafi, maupun lapangan pekerjaan dan ketrampilan. Salah satu kelompok sosial yang cukup besar saat itu ialah kaum buruh. Mereka bekerja di berbagai sektor, seperti : perdagangan, indistri,transportasi, perminyakan. Selain itu adapula pekerja bebas yang dinamakan *preman freemen*-orang bebas). Kelompok buruh ini kemudian membentuk organisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI), pasukannya dipimpin oleh Syamsu Harya Udaya dan Kunkiyat, bekas Digulis dan bekas *syodanco*. Pasukan buruh selain terlatih juga bersenjata, terpencar di Pasar Turi, Simpang, dan Gemblongan.

Kelompok buruh Penerbangan Angkatan Laut Surabaya (PALS) dibentuk akhir di GNI Surabaya dengan pimpinannya : Mtasid (Ketua) < Suparman (Wakil), Marsaid (Sekretaris). Kekuatan PALS sekitar 400 orang.

---

<sup>14</sup> Kelompok Kerja 10 Nopember 1945 di Jakarta, *op. cit.* , halaman 192-194.

Selain kelompok-kelompok besar seperti BKR, PRI-PPRI, BPRI, Hizbullah, dan lain-lain ada kelompok-kelompok pemuda *combatant*, jumlahnya kecil, atau bahkan sebagai kelompok perorangan sekitar 17 orang, namun tidak mau ketinggalan. Misalnya kelompok Suprpto, Widodo Budidarmo, kelompok putera-putwera Bali terhimpun dalam Gabungan Putra Bali, berjumlah sekitar 50 orang dipimpin oleh IGP Inten. Kelompok *combatant* bertugas mengamankan pabrik dan unit kerja masing-masing, sabotase, dan tindakan-tindakan criminal lainnya yang merugikan musuh. Kelompok lainnya, yaitu *non-combatant*, seperti Barisan Sipil, Badan Oeroesan Mobil (BOM), PPRI, Dapur Umum, Palang Merah RI, bertugas membantu logistik.

## **D. Pengambil Alihan Kekuasaan dan Persenjataan Jepang**

### **D.1. Belanda membonceng Pasukan Sekutu**

Dalam situasi genting karena bertepatan dengan ramainya konsolidasi berbagai kekuatan barisan perjuangan di Surabaya pada 16 September 1945 tentara sekutu (Inggris) di bawah *Southeast Command* (SEAC) dengan nama *Allied Force Netherlands Indie* (AFNEI) di bawah pimpinan Letjen. Philip Christison mendarat di Jakarta. Bagiannya, yaitu Divisi India ke 5 untuk Jawa Timur di bawah Mmajen mansergh, mendarat di Surabaya. Tugasnya (1) menerima penyerahan tentara Jepang, (2) membebaskan tawanan perang Sekutu, (3) melucuti senjata tentara Jepang, (4) menegakkan tertib sipil, dan (5) menuntut penjahat perang.<sup>15</sup>

Menghadapi kenyataan adanya Negara RI yang berdaulat dan telah menjalankan fungsi kenegaraannya Christison untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya, pada 1 Oktober 1945 mengakui keberadaan RI secara *de facto*, dan tidak akan mencampuri urusan politik di Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya, kekuatan Sekutu itu selain menggunakan kekerasan, juga meremehkan para pemimpin Indonesia sehingga terjadi berbagai konflik bersenjata seperti di Magelang, Surabaya, Ambarawa, Medan, dan sebagainya. Apalagi setelah diketahui secara terang-terangan mereka juga diboncengi kekuatan NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*) pemerintahan pelarian Hindia Belanda di Australia yang berusaha mengembalikan kekuasaan di Indonesia.<sup>16</sup> Mereka yang diselundupkan dengan duduk dalam RAPWI antara lain : Van der Plaas, Abdulkadir Wijayaatmaja, van Stratten, Jenderal Oyen, Dr. Van Mook, dan Laksamana Helfrich.

Sementara itu Tim intelijen Belanda tergabung dalam *Mastiff Carbolec* dengan kedok RAPWI pada 18 September 1945 mendarat di pangkalan Gunungsari., dengan tugas mendapat informasi agar tentara Belanda dapat segera mendarat di Indonesia, serta menyabot berita-berita tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.<sup>17</sup> Lebih dari itu Sekutu juga mengadakan larangan kepada masyarakat (1) mengadakan rapat raksasa, (2) membawa senjata, (3) mengibarkan bendera merah putih, (4) pelaksanaannya diserahkan kepada Jepang.

---

<sup>15</sup>Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, halaman 123-124.

<sup>16</sup>Dilakukan berdasarkan perjanjian *Civil Affairs Agreement (CAA)* Inggris-Belanda di Chequers 24 Agustus 1945.

<sup>17</sup>Van der Wall, *Notulen Rapat Seac*, September 1945, halaman 300.

## **D.2. Aksi-aksi Pengambil alihan Senjata dan Kekuasaan Jepang**

Perintah Sekutu menyebabkan *Arek-arek* Surabaya naik pitam, dan marah. Di Jakarta kemarahan itu tercermin dengan rapat raksasa di stadion IKADA, 19 September 1945. Di Surabaya pagi harinya telah meledak insiden bendera di Hotel Oranye, Tunjungan dengan membawa korban jiwa Mr. Ploegman dari pihak Belanda. Pihak Jepang dalam keadaan *status quo* ditekan oleh Sekutu untuk melarang kegiatan-kegiatan di atas, bila perlu dengan kekerasan.

Menghadapi situasi sulit tersebut pada 21 September 1945 Tentara ke-16 menetapkan :

1. Segera mendemobilisasikan pasukan Jepang.
2. Indonesia yang merdeka lebih baik bagi kedudukan Jepang.
3. Menjaga saling pengertian baik antara Indonesia dan Jepang, penggunaan senjata harus dihindari.
4. Dalam pemindahan kekuasaan kepada Sekutu, Jepang akan membantu prakarsa kepada pihak Indonesia, dan diusahakan agar Sekutu bersedia mengakui kenyataan dan situasi di Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam kenyataannya para pimpinan militer Jepang tidak sepenuhnya menjalankan ketetapan Tentara ke 16 di atas. Ada tiga pendirian di antara mereka : (1) yang berpegang teguh kepada instruksi Patterson untuk mempertahankan *status quo* sampai waktu ditentukan, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Sekutu, (2) bersikap membantu perjuangan Bangsa Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Jepang. Mereka mengakui dan akan menyerahkan senjata kepada Indonesia, dan (3) mereka yang bersikap netral, sesuai dengan sikap resmi tentara Jepang.<sup>19</sup>

Sebagai gambaran bagaimana sikap pemimpin tentara Jepang di Surabaya terhadap perjuangan *Arek-arek* Surabaya Bung Tomo menyatakan bahwa komandan tertinggi Balatentara dai Nippon dan Panglima AL Nippon di Surabaya tidak kecil bantuannya. Mereka berdua setelah melihat tekad rakyat yang bulat dan membara, menganggap tidak berguna bertempur melawan kaum *republikain* tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan maksud dari gerakan rakyat, keduanya memerintahkan anak buahnya agar menyerahkan segenap perlengkapan militer kepada bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Akan tetapi sikap petinggi Jepang tersebut bak ditelan kemarahan akeran terbukti dengan insiden bendera 19 September 1945 telah nyata-nyata pihak Belanda telah didepan hidung, sedang pihak Jepang kebanyakan berisik ragu-ragu. Akhirnya Pemerintah di Surabaya mengambil keputusan tegas (1) memutuskan segala hubungan dengan Jepang, (2) menghapuskan pemerintahan yang dualistis, (3) didekritkan bahwa semua pegawai menjadi pegawai RI, dan (4) mengambil alih semua potensi yang ada pada Jepang, khususnya persenjataannya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>GWJ Rimmelink, "The Emergence of the new Situation : The Japanese Army on Java after the surrender", *Militair Spectator*, No. 147, Februari 1978, halaman 57.

<sup>19</sup> Nugroho Notokusanto, *Tentara Peta pada jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1979), halaman 129-131.

<sup>20</sup> Bung Tomo, *op. cit.*, halaman 34.

<sup>21</sup> GWJ Rimmelink, *op. cit.*, halaman 57.

Keberhasilan *Arek-arek* Surabaya dalam, aksi-aksinya mengambil alih dan melucuti senjata Jepang disebabkan oleh faktor-faktor internal (1) kondisi dan situasi Surabaya secara sosiologis, histories, politis telah matang, (3) keberhasilan konsolidasi kekuatan *Arek-arek* Surabaya, di segala lapisan dan kelompok sosial, (3) adanya ekuatan Polisi Istimewa yang bersenjata lengkap sebagai kekuatan andalan perjuangan di Surabaya, (4) perembesan aksi-aksi NICA dengan kedok RAPWI dan *Intercross* terbukti dalam insiden bendera di Hotel Oranye telah mengelegakkan *Arek-arek* Surabaya yang berdarah panas. Adapun factor eksternalnya (1) adanya *vacuum of power* di Surabaya dari 17 Agustus-akhir Oktober 1945, (2) sikap pihak Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia tidak kompak hingga menyebabkan terjadinya ketegangan dan kekerasan dalam pengambil alihan kekuasaan dan persenjataan, (3) PJG Huijer yang menerima penyerahan kekuasaan dari Panglima Tentara Jepang di Surabaya tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan *Arek-arek* Surabaya.

Dalam pengambilalihan kekuasaan dan persenjataan Jepang untuk mempertahankan RI peranan PI sebagai pelopor hingga *Arek-arek* Surabaya lebih berani bertindak. Pengambil alihan dilakukan dengan organisasi agak teratur, beramai-ramai rakyat dibantu oleh PI, yang berbaur. Bila Jepang tidak bersedia menyerahkan senjatanya mereka diancam. Pengambilalihan dimulai dari yang kecil kemudian meningkat dengan merebut obyek penting yang dijaga ketat.

Para pemuda selain merebut persenjataan juga menguasai gudang-gudangnya. Dengan modal senjata yang ada *Arek-arek* Surabaya menyerbu dan merebut *Kitahama Butai (Lindetives)*, Don Bosco, *Kohara Butai, Tobu Jawa Butai* (Gedung HVA), Rumah sakit Karangmenjangan, Gedung *Kenpei Tai*, Markas Besar Kaigun (Embong Wungu), pelucutan tentara Jepang di *Hoogendorplaan* (Jl. Kartini), dan Morokrengan. Puncaknya adalah menyerbu dan merebut *Kenpei Tai* dan *Marine Kaigun* (Gubeng) yang dipertahankan Jepang dengan kekuatan senjata pada tanggal 1-2 dan 3 Oktober 1945. Kedua markas Jepang berhasil direbut melalui pertempuran sengit. Hanya dengan surat perintah Laksamana Sibata pasukan Jepang bersedia menyerahkan kekuasaan dan senjatanya kepada *Arek-arek* Surabaya. Pengambil alihan dilakukan dalam waktu hamper serempak, dalam tempo singkat dan cepat untuk menghindarkan reaksi pihak Jepang dan NICA yang telah berkeliaran di Surabaya. Sasaran sebelum dikepung dan diserbu hubungannya keluar diputuskan.

Adapun jumlah persenjataan yang berhasil diperoleh dari pengambil alihan di Surabaya tidak dapat secara pasti.. Berikut catatan yang menggambarkan jumlah senjata hasil pengambil alihan di Surabaya, belum termasuk alat-alat dari AL dan AU, serta senjata-senjata pribadi para opsir Jepang yang tidak karuan siapa pemegangannya. Jenis dan jumlah itu diperkirakan meliputi : senapan (19.000), pistol otomatis (700-846), senapan mesin (422-720), senapan mesin berat (480-504), pelempar granat (148), meriam infanteri (17), mortar (63), mortar baru (400), meriam anti tank (14-15), meriam lapangan/pegunungan (19-27), meriam berat (3-4), meriam anti pesawat terbang (142-145), panser (62), dan kendaraan bermotor (1900).<sup>22</sup> Jumlah senjata yang dapat direbut dari tangan Jepang menurut perkiraan WGJ Rimmelink lebih dari separo dari peralatan dan persenjataan yang dimiliki oleh TNI saat itu.

---

<sup>22</sup> WGJ Rimmelink, *op. cit.*, halaman 61.

Senjata-senjata tersebut dibagikan kepada rakyat dan badan-badan perjuangan di Surabaya seperti PRI, BPRI, BKR, TGP, Hizbullah, dan sebagainya. Bahkan juga dikirim ke luar Jawa Timur, misalnya ke Jawa Barat.<sup>23</sup>

### **E. Kekerasan-Kekerasan Sosial Pasca Proklamasi di Surabaya**

Dalam kondisi yang berubah dan bergerak dengan cepat sering menimbulkan rasa tidak puas, ambisi berlebihan, bahkan tidak jarang juga putus asa. Dalam perspektif revolusi 1945 keadaan itu selalu berubah, rangkaian peristiwa silih berganti, tumpang tindih dan bersamaan waktu. Proses konsolidasi dan pengambil alihan kekuasaan di Surabaya yang secara diskriptif berjalan lancar dan tertib tidak demikian halnya dalam kenyataan. Misalnya Abdul Wahab yang berprofesi wartawan, juga menjadi Ketua BKR Karesidenan Surabaya yang atas instink jurnalistiknya insiden bendera Tunjungan dapat dijejpretnya dengan baik. Wahab akhirnya invalid akibat penyerbuan *Kenpei Tai* harus dilaksanakan kekerasan senjata, dan kakinya kena ledakan mortir.

Bung Tomo sebagai pimpinan PRI bagian Penerangan pada Oktober 1945, saat di Jakarta menyaksikan sendiri kekejaman tentara Sekutu dan Belanda dalam mematahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Kesaksian itu disampaikannya di Markas Besar PRI yaitu Balai Pemuda hingga menimbulkan rasa benci, antipati dan dendam sedemikian membara hingga dikemudian hari tidak sedikit anggota PRI terbawa emosinya tatkala menangani kasus tuduhan mata, pengkhianatan, sabotase musuh, dan sebagainya. Apalagi setelah sutoomo dan Wiwiek Hidayat dibawa ke *Hoofd Bureau* untuk ditunjukkan sebuah buku yang menyebutkan nama PJG Huijer dan roeloefsen anggota AL Belanda pada Oktober 1945 telah berada di Surabaya, menyamar sebagai anggota *advance party* RAPWI, dan berlagak sebagai perwira Inggris. Informasi tersebut menambah marahnya *Arek-arek* Surabaya yang sebagian besar telah bergabung dengan PRI.

Masalah lain yang juga cukup rumit adalah masalah mata-mata atau mereka yang dicurigai sebagai mata-mata. Waktu itu PTKR cukup berwibawa dan mendapat kepercayaan masyarakat. Orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata oleh massa ditahan dan terlebih dahulu dipukuli beramai-ramai sebagai luapan kebencian. Bahkan juga pemukulan itu dilakukan secara bengis, baru kemudian diserahkan kepada PTKR atau MBPRI. Hal itu tidak jarang menyulitkan pimpinan. Karena semangat dan emosi meluap-luap maka mereka yang ditangkap karena tuduhan karena prsangka belaka, dan berakhir menyedihkan hingga yang bersangkutan tewas.

Contoh lain, seorang Guru SMP bernama Iskak bersama-sama Iswahyudi (Pahlawan Nasional) ditawan para pemuda, gara-gara isteri Iskak seorang wanita Belanda. Mereka nyaris menjadi korban karena tuduhana mata-mata dan luapan kebencian kepada Belanda. Iskak dan Iswahyudi pada zaman Belanda mendaftarkan diri pada pendidikan penerbang. Ia ikut tentara Belanda ke Australia dan berlatih terbang. Oleh Sekutu Iswahyudi diselundupkan ke Indonesia melalui pantai Blitar Selatan. Ia tertangkap oleh Jepang. Setelah *Arek-arek* Surabaya mengambil alih kekuasaan dari Jepang mereka diserahkan kepada PTKR. Pimpinan PTKR memutuskan membebaskan Iskak dan Iswahyudi. Keduanya diberi seragam dan diminta untuk tetap tinggal di markas. Mereka diberi tugas memasang lampu dasnsistem bel sebagai alat berkomunikasi dalam markas dan monitoring siaran radio luar negeri berbahasa Inggris.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 55.

<sup>24</sup> Kelompok Kerja 10 Nopember 1945 di Jakarta, *loc. cit.*

Seorang bekas *syodanco* Peta, wajahnya mirip Jepang, berasal dari Banyuwangi bepergian ke Surabaya, ia ditangkap oleh pemuda dan diserahkan kepada PTKR. Sebelumnya ia dikerubung dan dimaki-maki dan nyaris bekas *syodanco* itu dipukuli beramai-ramai atau dikeroyok. Untung nasib bekas *syodanco* itu, ia kenal hasanuddin. Oleh PTKR ia diamankan dan diberi surat keterangan sehingga ia dapat dengan aman pulang ke tempat asalnya.<sup>25</sup>

Seorang bekas *Cudanco* bernama R.M. Suryo, anak RM Suwongso, pegawai mengah di kantor Gubernur pada zaman belanda, ditangkap oleh para pemuda dan setelah dimaki-maki dan dipukuli diserahkan kepada PTKR. RM Suryo waktu kecil panggilannya Yanto, kulitnya kunig bersih, wajahnya cakap, dan penampilannya menunjukkan bahwa dari elite. Pada zaman jepang juga pernah menjadi anggota Peta. Ia pada zaman Belanda pernah aktif di kepanduan *Padvinder* (*Netherlands Indische Padvinders Vereniging*). Pada waktu itu bangsa Indonesia juga telah memiliki organisasi kepanduan sendiri seperti Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI), Surya Wirawan (Parindra), *Hizbul Wathan* (Muhammadiyah), dan lain-lain. Namun sebagai orang terpendang RM Suryo tidak ikut kepanduan bangsa sendiri. Bahkan ia pernah terpilih ikut jamboree di Negeri Belanda. Di sana ia bersalaman dengan Ratu Wilhelmina, dan foto kenangan itu disimpannya dan akhirnya diketahui orang lain. Itulah mengapa ia ditaangkap, dimaki dan dipukuli sampai ditawan oleh pemuda. Oleh pimpinan PTKR RM Suryo dapat dibebaskan, karena tuuduhan itu dianggap tidak berdasar untuk menahan RM Suryo. Pagi dibebaskan, sorenya ditempat lain ia ditangkap lagi oleh pemuda yang bermaarkas di gedung *Borsumij*. Mendengar hal itu Suharyo, pimpinan PTKR memerintahkan untuk membebaskan RM Suryo. Setelah bebas ia masih berbuat jasa mengantarkan suharyo ke gudang senjata di bekas *daaidan*-nya di Gunungsari. Penjaga gudang itu adalah bekas anak buah Suryo di peta. Dari tempat itu PTKR mendapatkan sekitar 10 mitraliur berat caliber 12,7, 50 caliber dan metraliur caliber 7,7/303 LE.<sup>26</sup>

Dua hari kemudian RM Suryo ditaangkap lagi oleh Sabarudin (bekas *syodanco*), yaitu bekas anak buahnya Suryo di Peta. Sabarudin sebagai komandan pasukan TKR terkenal sebagai seorang yang kejam, gemar membunuh tawanan tanpa alasan yang jelas. Sabarudin kemudian menyiksa dan membunuh RM Suryo di alun-alun Sidoarjo di hadapan khalayak ramai dengan tuduhan mata-mata. Padahal motif sebenarnya adalah Sabarudin merasa kalah bersaing dalam masalah pacar. Berita pembunuhan tersebut datangnya terlambat di markas PTKR. Sabarudin sendiri akhirnya juga terbunuh dalam suatu clas bersenjata dengan pasukan lain di daerah Kediri pada tahun 1949.<sup>27</sup>

Tidak jarang dalam gerakan yang bersifat kolektif dan spontan seperti halnya pada insiden bendera di Hotel Oranye, 19 September 1945 menyelinap pula kelompok yang tidak bertanggung jawab. Di tengah keramaian dengan suasana yang emosional karena kemarahannya massa kemudian melakukan perusakan. Dalam kesempatan itu kelompok yang tidak bertanggung jawab tadi menggunakan kesempatan untuk mengangkut (Jawa : *usung-usung*), barang-barang yang ditemui di tempat itu. Akhirnya muncul *pameo* untuk menamai kelompok orang yang tidak bermoral itu dengan nama “Barisan Usung-usung “ atau BUU.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Panitia Pelaksana Survey Sejarah Kota Surabaya, *Buku Laporan Survey Sedjarah Kota Surabaya* (Panitia Survey : Surabaya, 1974), halaman 82.

<sup>26</sup> Kelompok Kerja 10 Nopember 1945 di Jakarta, *loc. cit.*

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pelaku Sejarah 1945 di Surabaya : Wiwiek Hidayat, A. Radjab dan Gatutkusuma, pada tanggal 21 Mei 1985 di Surabaya.

<sup>28</sup> Roeslan Abdulgani, *Sratu Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia* ( Yayasan Idayu : Jakarta, 1980).

Adapula kejadian yang mendirikan bulu roma, tatkala tersiar luas tentang kekejaman Belanda baik di Jakarta maupun di Semarang. Suasana panas meliputi para pemuda pejuang *Arek-arek* Surabaya pada akhir September dan Oktober 1945. Tatkala itu ada sekelompok pemuda yang mengenali wajah seseorang yang menjadi pembicaraan umum sebagai mata-mata Belanda. Dengan teriakan lantang pemuda berteriak keras “Mata-mata tangkap! Mata-mata tangkap!”. Dalam waktu sekejap jalan di dekat simpang lima Blauran tersebut terlihat bergerombol orang-orang yang meneriaki dan memukuli yang dituduh mata-mata. Dari arah berlainan datang orang membawa *tekyari* (bamboo runcing) sambil mengomel bahwa keluarganya habis dibantai oleh pengkhianat penjajah. Tanpa berfikir panjang *Arek* Surabaya yang bersenjata takeyari tadi setelah tiba di tempat kejadian segera merebut si korban dan menusukkan takeyarnya dari dubur hingga tembus di kerongkongannya. Massa pun berteriak histeris “mampus kon mata-mata pengkhianat bangsa”.<sup>29</sup>

Demikian sekelumit kekerasan pasca proklamasi di Surabaya yang terekam. Tidak mustahil masih ada bentuk-bentuk lain yang lebih keras namun tidak terekam dalam kenangan, ingatan ataupun tulisan.

## **F. Penutup**

Sebagai penutup uraian ini patutlah disadari bahwa dalam situasi yang penuh dengan gerak dinamis, emosi meluap-luap untuk mengusir kekuasaan asing dari Surabaya serta segala cengat perenang yang berkaitan dengan penjajahan diakui oleh para pemimpin dan pelaku sejarah adanya tindakan yang keluar dari rel pada masa pergolakan yang penuh pergolakan dan letupan itu. Tindakan itu biasanya dilakukan oleh perorangan bermental labil, ataupun oleh massa yang membabi buta sebagai luapan penderitaan, kelainan jiwa yang terpendam, bukan merupakan kecenderungan bersifat umum.

*Arek-arek* Surabaya yang bersemangat juang dengan sadar dan tetap berakal sehat tetap menduduki tempat dominant dalam suasana revolusioner, hingga tindakan negatif seperti telah dipaparkan yang diketahui dapat dinetrasiir. Dalam situasi demikian kader-kader pergerakan nasional yang pernah bekerja di bawah tanah (*illegal*) tidak sedikit peranannya dalam menyalurkan kegiatan dan aspirasi massa ke jalan yang benar.

Kejadian aneh dan tidak disangka-sangka itu dikemukakan sekedar memberi gambaran yang secara fisik dan realistik perihal keadaan revolusi saat itu. Suasana yang kelihatan semrawut dan sangat tidak teratur tetapi bila dianalisis secara mendalam tetap bertujuan baik sebagai konvergensi dari gerakan menuju terwujudnya kemerdekaan yang bebas dari segala bentuk penjajahan. Tetapi bagi mereka yang goyah iambnnya atau lemah mentalitasnya, sering kali tidak tahan melihat suasana kemudian tersalur pada tindakan-tindakan yang dapat dikatakan di luar batas kemanusiaan, khususnya terhadap mereka yang tidak setuju Indonesia merdeka, antek-antek Belanda, kaum penyabot, mata-mata musuh, sehingga keadaan di atas terkesan sebagai anarkhisme.<sup>30</sup>

Surabaya, 20 Agustus 2004

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pelaku Sejarah 1945 di Surabaya, *loc. cit.*

<sup>30</sup> Roeslan Abdulgani, *Tanggapan Makalah Panitia pada Seminar Kepahlawanan Pertempuran 10 Nopember 1945 tanggal 28 Agustus 1985 di Gedung Grabadi Surabaya* (Panitia Seminar Kepahlawanan 10 Nopember 1945 : Surabaya, 1985).

